

BAB 6

LINGKUNGAN INTERNAL EKSTERNAL

6.1 Lingkungan Internal

1. Aspek Pemasaran

Kementerian Pariwisata RI telah mengembangkan portopolio strategi pemasaran pariwisata yaitu Pemasaran: Destination, Origin dan Time (DOT), **Promosi: Branding, Advertising dan Selling (BAS), dan Penempatan Media: Paid Media, Own Media dan Sosial Media (POS).** **Pemasaran** yang Pertama **destination** dalam pemasaran pariwisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan adalah destinasi tujuan pariwisata yang dikunjungi oleh para wisatawan. Destinasi pariwisata bahari yang sangat dipertimbangkan oleh wisatawan adalah keindahan alam dan aktivitas pariwisata bahari. Keindahan alam pariwisata bahari di Kabupaten Bintan tidak perlu diragukan lagi, hal ini bisa dilihat dari alam bawah laut dengan pemandangan yang menakjubkan serta lautnya yang masih sangat natural, pantai dengan pasir putih yang indah dan hutan mangrove yang masih terjaga. Aktivitas pariwisata bahari di Kabupaten Bintan sangat beragam mulai dari yang mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, history dan cinta terhadap alam.

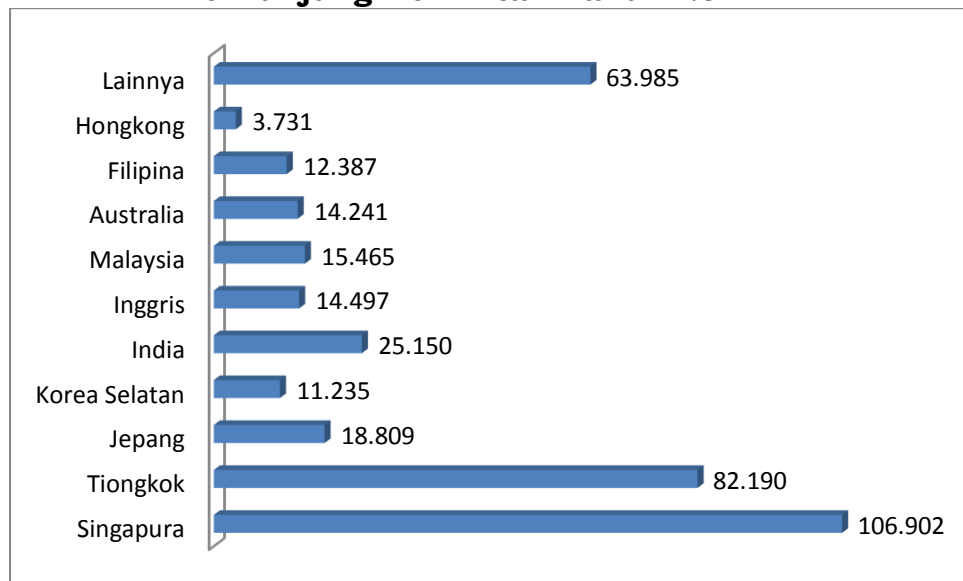
Gambar 6.1 Portofolio Strategi Pariwisata Nusantara



Sumber: Strategi Pemasaran Wisata bahari Dengan Pendekatan DOT, BAS dan POS, 2016

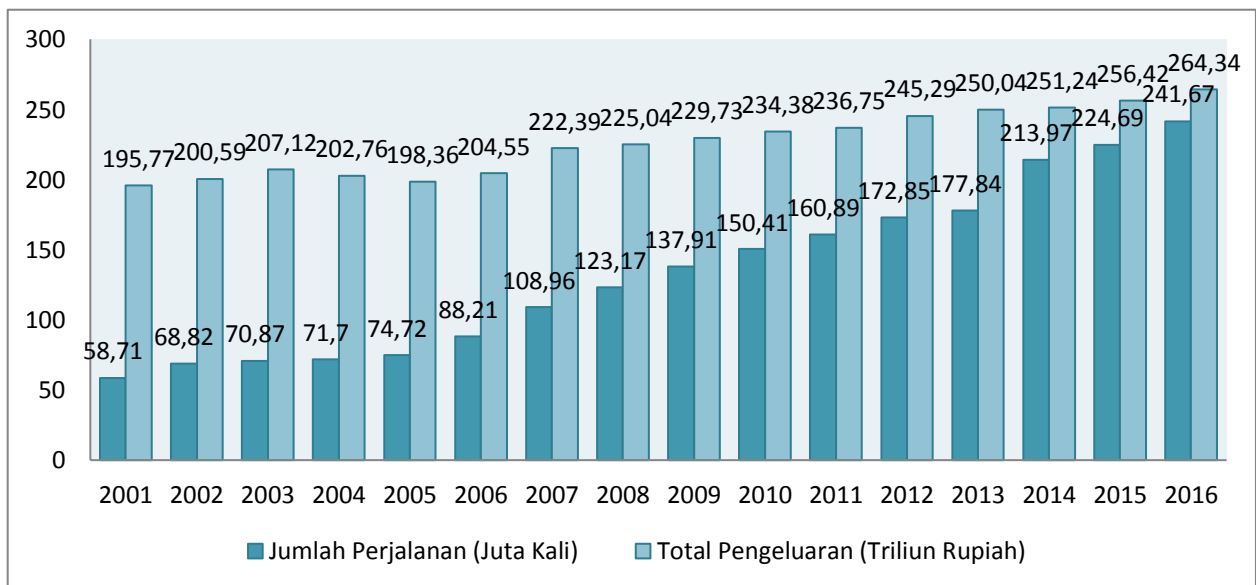
Kedua **origin** berkaitan dengan daerah asal wisatawan. Pengetahuan tentang daerah asal wisatawan akan sangat membantu ketika akan memutuskan daerah yang akan dijadikan pasar sasaran kegiatan pemasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan setiap tahunnya merilis persentasi wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Bintan dan Kementerian Pariwisata RI telah merilis Statistik Profil Wisatawan Nusantara Tahun 2016.

Gambar 6.2 Persentase Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Ke Bintan Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Bintan Dalam Angka 2018

Gambar 6.3 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Winus) di Indonesia dan Total Pengeluaran Tahun 2001-2016

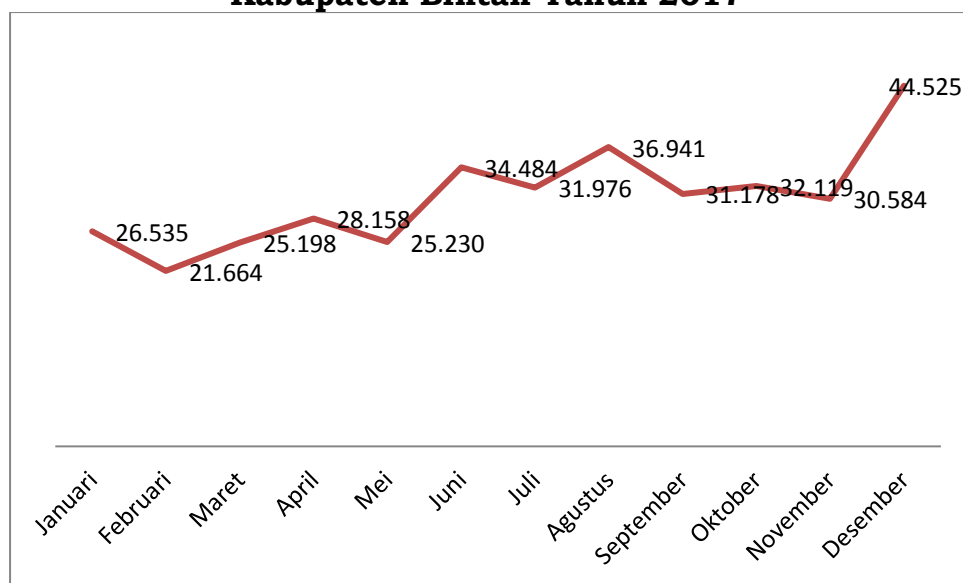


Sumber: Statistik Profil Wisatawan Nusantara Tahun 2016

Ketiga **time** dengan waktu-waktu tertentu yang biasa digunakan oleh wisatawan untuk berlibur. Pengetahuan tentang time ini akan membantu pemasar wisata bahari untuk menjawab pertanyaan “kapan sebaiknya kami melakukan promosi wisata

bahari?” Tidak semua wisatawan mempunyai waktu kapan saja dapat berwisata. Selain itu wisata bahari ini bersifat seasonal. Wisata bahari sangat seasonal karena tergantung dengan kondisi cuaca, ombak besar dan air pasang. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan setiap tahunnya merilis jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Bintan.

Gambar 6.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Bintan Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Bintan Dalam Angka 2018

Promosi yang pertama **Branding** Branding berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan citra daerah tujuan wisata. Wisata bahari harus dikemas sedemikian rupa sehingga dicitrakan baik oleh para wisatawan. Branding wisata bahari dapat dilakukan dengan mendasarkan pada keindahan alamnya, keragaman aktivitas baharinya, sejarah dan lain-lain. Kabupaten Bintan menggaungkan branding “Bintan Breathtaking Journey” yang telah dimasukkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017. Namun sayangnya branding tersebut tidak menggambarkan identitas pariwisata

bahari di Kabupaten Bintan, bahkan masyarakat Kabupaten Bintan belum sepenuhnya memahami branding tersebut.

Kedua **Advertising** berkaitan dengan kegiatan komunikasi pemasaran daerah tujuan wisata yang bersifat nonpersonal yang ditujukan kepada masyarakat luas. Advertising memiliki tugas untuk mengkomunikasikan wisata bahari, meningkatkan image, dan mengingatkan kembali tentang keberadaan wisata bahari yang sangat layak untuk dikunjungi. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) sebagai perusahaan pengelola kawasan wisata Lagoi telah melakukan promosi baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu promosi tingkat internasional pada tahun 2017 PT.BRC telah mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Bintan kepada 135 agent tour dan travel terkemuka di Singapura. Sedangkan kerjasama nasional pada tahun 2017 penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Hotel Borobudur Intercontinental, PT. BRC dan Sriwijaya Air Grup bersinergi untuk membangun pariwisata di Bintan. Sebanyak tiga hal disepakati antara lain, pertama, melakukan kegiatan kerja sama promosi dan pemasaran bersama, termasuk menjajaki multiple destination concept antara Bintan-Yogyakarta-Bali-Manado dan destinasi lainnya. Kedua, BRC dengan didukung oleh perusahaan induk Gallant Venture Group berencana memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas dari dan ke Bintan Resort, sekaligus mengembangkan hotel, fasilitas

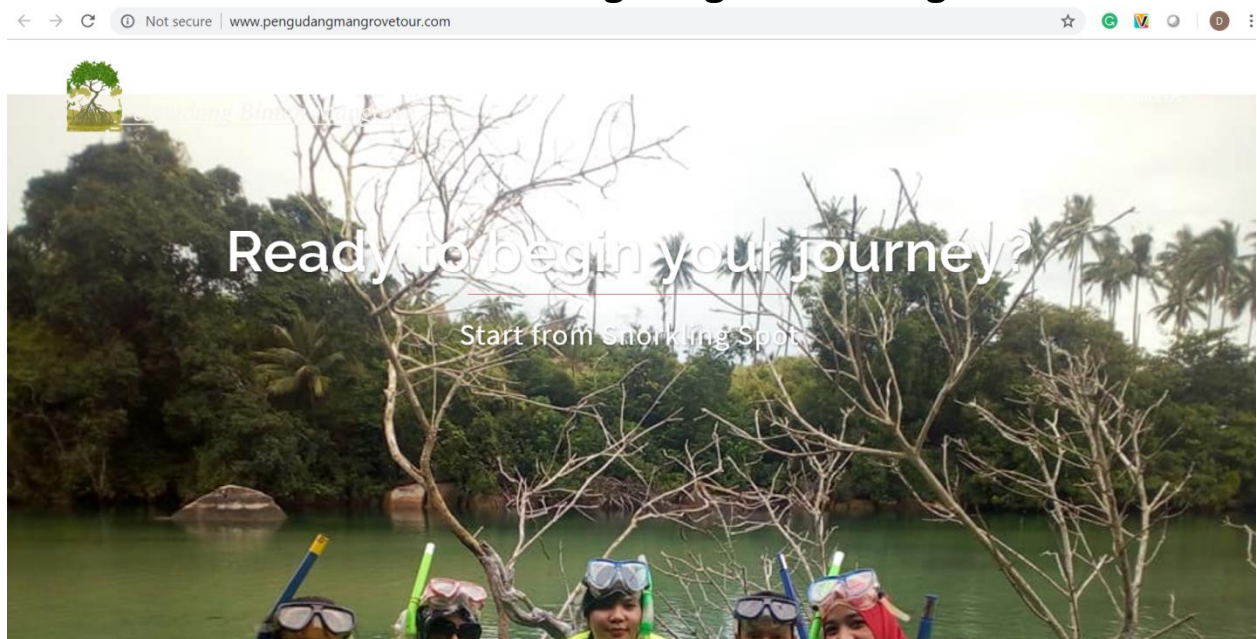
pendukung, wahana atraksi, listrik, air dan sebagainya. Ketiga, Sriwijaya Air akan memperkuat kapabilitas dan kapasitas layanan penerbangan pariwisata internasional, termasuk pengembangan rute domestik dan internasional baru, serta pengadaan armada pesawat berbadan lebar.

Ketiga **Selling** berkaitan dengan upaya jangka pendek untuk merangsang agar segera masyarakat untuk mengunjungi destinasi tujuan wisata. Usaha untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan dilakukan dengan seringnya melakukan pameran dengan menjual paket-paket wisata bahari. Travel fair merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menari pembeli sebanyak-banyaknya. Pemberian diskon dan harga khusus merupakan cara yang baik untuk dilakukan guna merangsang pembelian yang banyak. Pertimbangannya adalah wisatawan yang sensitif terhadap harga dengan mereka yang tidak sensitif terhadap harga juahnya jauh lebih banyak mereka yang sensitif terhadap harga. Menjamurnya paket one day trip untuk wisata bahari di Kabupaten Bintan dengan sasaran masyarakat Kota Batam dengan harga yang terjangkau.

Penempatan **Media** yang pertama **Paid Media** adalah media berbayar yang digunakan untuk mengkomunikasikan daya tarik wisata. Media berbayar dapat merupakan televisi, radio, surat kabar, majalah, baliho, spanduk, dan lain-lain. Dikarenakan keterbatasan anggaran, pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Bintan belum menggunakan paid media.

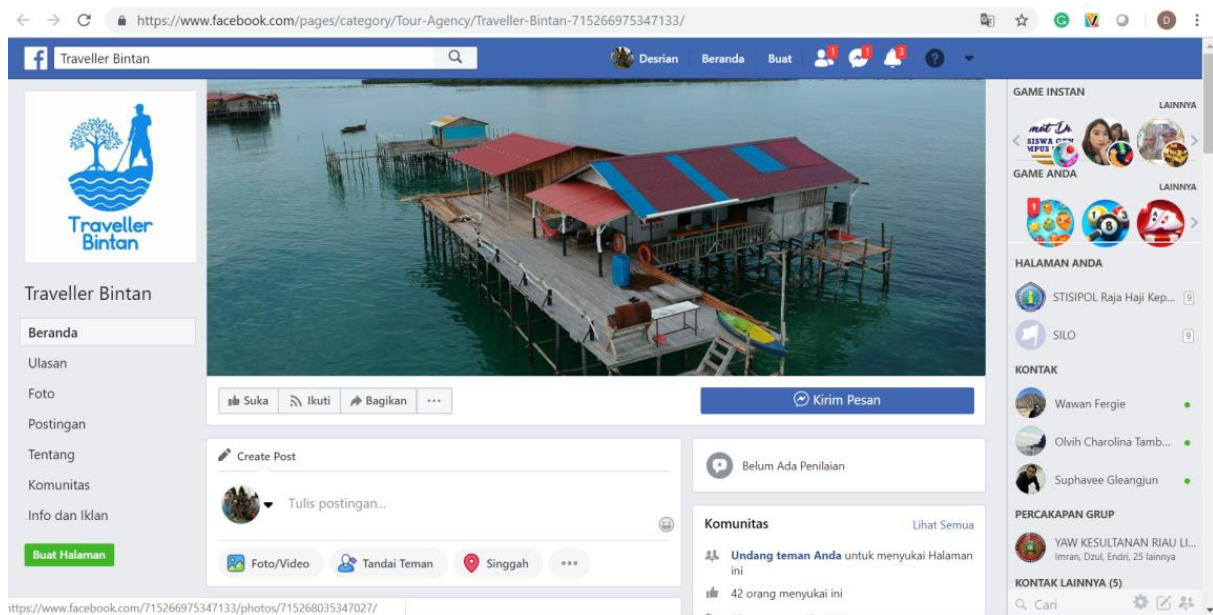
Kedua **Own Media** adalah media milik sendiri yang digunakan untuk mengkomunikasikan daya tarik wisata. Di samping menggunakan media berbayar kegiatan komunikasi pemasaran wisata bahari juga dapat dilakkan dengan memanfaatkan media yang dimiliki sendiri. Media yang dimiliki sendiri dapat berupa website atau saluran komunikasi lain yang merupakan milik sendiri. Pemanfaatan website sudah dilakukan oleh Pengelola pariwisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan dalam menggunakan paid media hanya baru menggunakan webside, seperti yang digunakan oleh Pengudang Bintan Mangrove dengan alamat <http://www.pengudangmangrovetour.com/>. Namun sayangnya webside tersebut belum sepenuhnya berfungsi untuk melakukan pemesanan paket wisata.

Gambar 6.5 Website Pengudang Bintan Mangrove

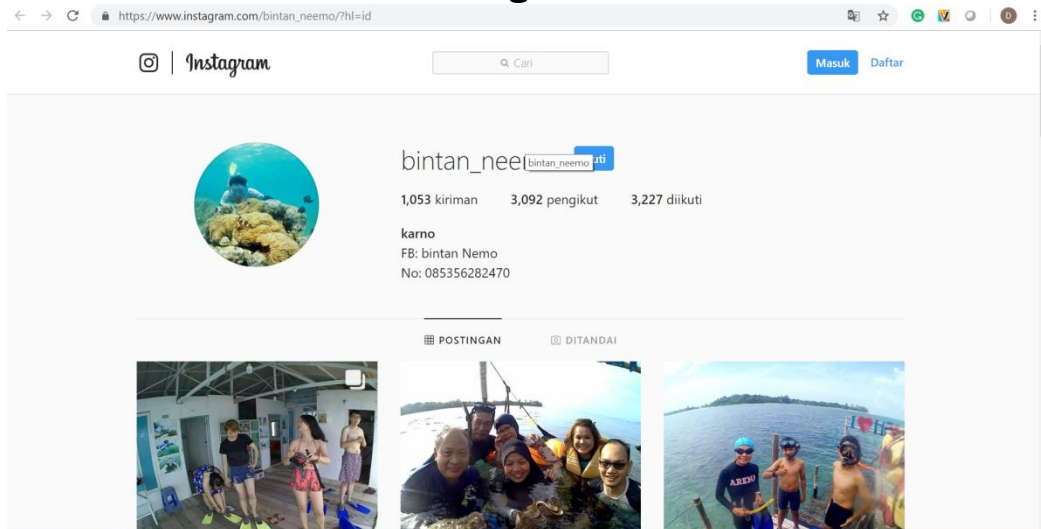


Ketiga **Sosial Media** adalah media sosial yang digunakan untuk mengkomunikasikan daya tarik wisata. Pada masa kini siapa yang tidak mengenal atau menjadi salah satu dari pelaku social media. Sosial media harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan suatu destinasi tujuan wisata. Keampuhan sosial media untuk menjadikan suatu destinasi menjadi populer sudah sangat terbukti. Saat ini semua pengelola pariwisata bahari berbasis masyarakat telah menggunakan media social seperti facebook, instagram, youtube dan whatsapp.

Gambar 6.6 Facebook Traveller Bintang



Gambar 6.7 Instagram Bintang Neemo



2. Aspek Keuangan

Pemerintah Kabupaten urusan pariwisata sebagai urusan pilihan yang utama, namun selama ini hanya memfokuskan pengembangan pariwisata di kawasan wisata Lagoi, hal ini di lihat dari pelaksanaan event pariwisata hanya dilaksanakan di Lagoi. Kemudian, Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan juga tidak melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bintan dalam mengembangkan potensi wisata di daerah masing-masing masing mengharapkan bantuan dari pemerintah desa melalui ADD dan bantuan pihak swasta. Dinas Pariwisata mempunyai pemikiran sektor pariwisata harus memiliki dampak langsung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pariwisata yang memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat terlupakan. Seperti yang dikutip dari LKPJ tahun 2016, dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, program yang dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini dilaksanakan dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 5.534.480.636,00. Outcome program ini adalah peningkatan informasi pasar pariwisata, mempublikasikan dan mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki ke dalam dan luar negeri sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Kegiatan pokok yang dilakukan anatara lain: (1) peningkatan promosi pariwisata dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp 152.017.160,00 (2) Penyediaan materi promosi wisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp 238.940.600 (3) partisipasi kegiatan parade tari Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar Rp 144.772.500 (4) partisipasi penyusunan buku Highlight Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp 234.575.500 (5) penyelenggaraan event pariwisata (Tour De Bintang) dengan realisasi anggaran Rp 1.713.102.00 (6) Penyelenggaraan Sail Indonesia (Sail Karimata) dengan realisasi anggaran Rp 246.836.745 (7) wisatawan perdana dengan realisasi anggaran sebesar Rp 144.897.200 (8) pengembangan gallery promosi bintang dengan realisasi anggaran Rp 168.634.581 (9) partisipasi mengikuti Kepri Karnaval dengan realisasi anggaran Rp 215.150.300 (10) penyelenggaraan event Ironman Bintang dengan realisasi anggaran Rp 961.184.900 (11) festival tari bintang dengan realisasi anggaran Rp 235.303.000 (12) pentas kesenian rakyat dengan realisasi anggaran Rp 132.943.300 (13) partisipasi

mengikuti pawai budaya Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran Rp 380.142.850 (14) kegiatan penyelenggaraan event pariwisata (Moonrunner) dengan realisasi anggaran Rp 322.158.500 (15) kegiatan penyelenggaraan event pariwisata (Spartan Bintan) dengan realisasi anggaran Rp 243.821.500

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 139.781.700 yang digunakan untuk pengembangan Museum Bahari.

c. Program Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata

Program ini dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 57.231.800 yang digunakan untuk tersedianya fasilitas informasi yang update secara elektronik (We Site)

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Menurut Kusworo dan Dainanik (2002:109) ada kecenderungan yang cukup menonjol dalam kegiatan pariwisata internasional, yaitu tuntutan terhadap standarisasi kualitas produk dan pelayanan wisata. Untuk merespon kecenderungan itu, maka setiap daerah tujuan wisata (destinasi) dituntut untuk mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), karena SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan mutu produk dan pelayanan wisata.

Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai peran sentral dalam pembangunan SDM di bidang pariwisata. Oleh karena itu, aparatur birokrasi di Kabupaten Bintan harus memiliki standar kompetensi di bidang kepariwisataan untuk dapat menjalankan fungsi sebagai pengambil keputusan. Dalam prakteknya masih banyak masih banyak SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang pariwisata. Kemudian sirkulasi aparatur birokrasi didasari pada kriteria eselonisasi jabatan memiliki relevansi yang rendah dengan tingkat kompetensi bagi tercapainya pembangunan pariwisata. Setelah itu, aparatur birokrasi belum sepenuhnya bersikap profesional, berani dalam mengambil resiko, memiliki prakarsa dalam membaca dan merespon kecenderungan perkembangan pariwisata.

Peningkatan daya saing pariwisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan harus memiliki keunggulan diimbangi dengan ketersediaan SDM yang kompeten. Pengembangan SDM pariwisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, bagi masyarakat yang berada di wilayah yang memiliki potensi wisata. Pada tahun 2017, hanya ada 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan yaitu (1) program pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata tahun 2017 sebesar Rp. Rp 124.044.700,00 dan (2) program pelatihan peningkatan kualitas pramuwisata (pelatihan Bahasa Inggris) sebesar Rp 138.491.300,00. Sedangkan pada

pendekatan formal, di Kabupaten Bintan belum ada memiliki SMK pariwisata, namun tahun 2008 SMK 1 Bintan Timur telah memiliki jurusan perhotelan dan tahun 2018 SMK 1 Bintan Utara juga telah memiliki jurusan Perhotelan. Pada tahun 2015, Kabupaten Bintan telah memiliki Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Bintan.

4. Aspek Produksi/Operasi

Hal lain adalah berkembangnya akomodasi murah (budget hotel) di Kabupaten Bintan. Jenis akomodasi ini yang setara dengan hotel bintang 3 telah menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk berwisata juga akan lebih murah, dan ini akan mendorong pergerakan wisatawan lebih besar pula. Disisi lain, tumbuhnya akomodasi murah namun tidak tergantung dari pendapatan dari makanannya telah menghidupkan pula usaha makanan di sekitar hotel yang bersangkutan. Usaha kecil dan menengah bidang makanan akan menerima dampak positif dari pertumbuhan hotel jenis ini.

Dalam melihat operasi wisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan dengan menggunakan beberapa indikator yaitu:

a. Pengelola

Pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Bintan masih diinisiasi oleh masyarakat pendatang, sedangkan masyarakat sekitar belum memiliki kesadaran bahwa tempat mereka mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Masyarakat sekitar hanya menjadi pengikut, dengan kecendrungan tidak mengelolanya dengan baik

dan terampil. Setelah dikembangkan, kendala yang terjadi masyarakat tempatan hanya menjadikan pariwisata sebagai pekerjaan sampingan. Setelah itu mereka akan menghabiskan keuntungan yang dimiliki sehingga untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada tidak dapat dilakukan. Sedangkan dari sisi kepemilikan dapat berupa satu golongan pengusaha yang bersama-sama menanamkan modalnya dalam penyediaan fasilitas wisata.

b. Struktur Masyarakat

Sebagai nelayan, masyarakat di Kabupaten Bintan belum menjadikan sektor pariwisata sebagai peluang mata pencarian tambahan. Seharunya ada pergeseran mata pencarian yang berhubungan dengan kepariwisataan sehingga masyarakat sekitar ikut serta dalam pengembangan pariwisata dan diharapkan menambah kelancaran dalam pelaksanaannya. Adapun mata pencarian tambahan yang memiliki potensi dalam mendukung pariwisata bahari di Kabupaten Bintan seperti atraksi budaya lokal, pelestarian kerajinan (tempat demonstrasi, kios cendramata) dan home industry berupa mahanan khas.

c. Kegiatan pengelolaan

Potensi wisata bahari di Kabupaten Bintan sudah tidak perlu diragukan lagi, dengan keragaman aktivitas wisata bahari yang sangat menarik dan alami berupa kejernihan air laut, keindahan pantai dengan pasir putih yang berkualitas, biota dan trumbu karang yang beraneka ragam dan hutan mangrove yang masih

terjaga. Hal tersebut yang menjadi modal yang telah dimiliki masyarakat, namun tidak diimbangi dengan rendahnya kualitas keahlian SDM dalam memanfaatkannya serta tidak berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan SDA yang tersedia.

d. Aspek Regulasi

Pembangunan kepariwisataan daerah pada dasarnya mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dan di Kabupaten Bintan kebijakan pengembangan kepariwisataan sudah termasuk dalam dokumen perencanaan. Akan tetapi perlu dilakukan aksi strategis turunan kebijakan kepada hal teknis terkait dengan pengembangan terhadap pariwisata bahari di setiap kecamatan, desa/kelurahan. Selain itu kebijakan lanjutan baik berupa amenities, aksesibilitas dan atraksi terhadap pengembangan kawasan destinasi pariwisata unggulan daerah (DPUD) yang memiliki potensi daya tarik wisata bahari. Lebih lanjut terkait pariwisata berbasis masyarakat perlu diatur lebih lanjut demi peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata yang ada ditengah-tengah masyarakat demi meningkatkan peran serta masyarakat baik secara berkelompok maupun individu. Tata guna lahan darat dan laut didalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan hukum pemanfaatan wilayah dibidang pariwisata. Dengan adanya petunjuk teknis dan pelaksana dari setiap regulasi ditingkat daerah yang mengacu kepada peraturan perundangan ditingkat provinsi dan pusat

maka akan menjadi dasar bagi pengembangan pariwisata secara berkesinambungan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Secara teknis, Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relatif aman terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi karena berdasarkan SNI 03-1726-2002, tentang Wilayah Gempa Indonesia, Kabupaten Bintan termasuk dalam Wilayah Gempa I dengan kemungkinan potensi gempa paling rendah. Sedangkan wilayah gempa yang paling berpotensi berada pada Wilayah Gempa VI. Meskipun demikian, bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Bintan adalah rawan gelombang pasang, banjir, longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai. Kawasan rawan bencana ini tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan, yaitu :

a. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan yang berada di sekitar pantai sangat rawan terhadap gelombang pasang dan angin kencang. Kawasan ini umumnya terletak di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, seperti di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan dan Pulau Mapur.

b. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bintan terdapat di Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Seri Kuala Lobam dan Gunung Kijang memiliki kondisi geologi yang mendukung terjadinya banjir serta kontur wilayah yang cenderung rata.

c. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Pulau Bintan bagian utara.

d. Kawasan Rawan Abrasi

Kawasan yang rawan terhadap abrasi diantaranya adalah Pantai Trikora sepanjang ± 10 Km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 Km, Pantai Sei Kecil – Sakera sepanjang ± 10 Km, dan Pantai Lobam sepanjang ± 4 Km.

Sedangkan dilihat dari sisi keamanan, jumlah demonstrasi yang terjadi pada tahun 2010, maka 90% demonstrasi yang dilakukan memiliki legalitas dari kepolisian dan 10%-nya adalah demonstrasi ilegal. Artinya, secara umum situasi ketertiban dan keamanan di masyarakat masih aman dan terkendali. Di era demokrasi seperti ini, kegiatan demonstrasi merupakan sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari proses demokratisasi sepanjang tidak bersifat anarkis. Berdasarkan data yang ada, demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Bintan tidak berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada.

Landmark diartikan sebagai bangunan atau tempat yang mudah dikenali dan penanda suatu tempat. Orang luar daerah akan mengenal Menara Eiffel di Paris, Patung Liberty di New York, Menara Kembar di Malaysia, Candi Borobudur di Magelang dan lain-lain.

Melihat akan hal ini, landmark bisa dijadikan produk efektif untuk promosi daerah. Untuk mengembangkan pariwisata bahari di Kabupaten Bintan, sebaiknya pemerintah daerah mendesain landmark yang bernuansa bahari.

6. Sistem Informasi

Sejak tahun 2018, 36 kantor desa di Kabupaten Bintan telah terkoneksi dengan internet, termasuk desa yang berada di Kecamatan Tembelan. Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner dalam suatu wilayah pemerintah daerah. Jumlah jaringan komunikasi menggambarkan besarnya ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Adapun jumlah jaringan telepon genggam di Kabupaten Bintan pada tahun 2012 berjumlah 114 buah, sedangkan operator (stasioner) berjumlah 100 buah dengan demikian perbandingan jaringan telekomunikasi dengan operator 1,14 %.

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Adapun surat kabar terbitan nasional yang masuk ke

Kabupaten Bintan berjumlah 6 surat kabar, sedangkan surat kabar terbitan lokal yang masuk ke Kabupaten Bintan berjumlah 13 surat kabar. Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Adapun penyiaran radio nasional berjumlah 1 buah, TV lokal berjumlah 2 buah, TV nasional 9 buah

7. Budaya Masyarakat

Masyarakat Bintan adalah masyarakat melayu yang berprofesi sebagai nelayan sangat menjunjung tinggi ajaran islam. Masyarakat melayu mempunyai sikap yang terbuka dan menerima pendatang sebagai saudara, dengan mengedepankan kerjasama, hormat menghormati dan menghargai. Pesisir dan pantai adalah tempat berkembangnya masyarakat nelayan, karena pada umumnya kehidupan mereka tergantung dengan laut, baik dengan cara menangkap ataupun budidaya. Pekerjaan mereka sangat tergantung

dengan sumber daya yang tersedia di pesisir dan laut. Masyarakat nelayan telah **membagi pekerjaan mereka berdasarkan gender**, untuk laki-laki wilayah kerjanya di laut sedangkan perempuan wilayah kerjanya di darat. Dengan adanya pembagian kerja berdasarkan gender tersebut, pariwisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan mempunyai peluang yang besar ini dikarenakan pariwisata bahari menjadikan laut dan sungai sebagai lokasi pengembangan pariwisata.

Masyarakat nelayan juga menjalin hubungan **patron-klien**. Namun uniknya hubungan patron-klien yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bintan sangat membantu masyarakat nelayan dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga pada saat mereka pergi ke laut dan patrol membantu bekal (bahan bakar, rokok dan snack) pada saat patron akan ke laut. Sedangkan untuk membalas jasa patron tersebut, klien akan menjual hasil tangkapan. Sisi baik dari penjualan tersebut adalah klien akan mudah dalam menjual hasil tangkapannya, hasil tangkapan akan dibeli semua oleh patrol. Hal ini akan menghindari dari tidak lakunya hasil tangkapan serta menghindari hasil tangkapan yang membusuk.

Perilaku masyarakat nelayan di Kabupaten Bintan dalam mengeksploitasi terus menerus dengan cara yang merusak telah berubah. Mereka telah memahami batasan-batasan yang ada serta memahami nilai ekonomis dari sumber daya yang bersifat open access tersebut. Namun, konflik antar masyarakat nelayan dalam memperebutkan sumber daya tidak dapat dihindari. Konflik antara

masyarakat nelayan Tembeling Kabupaten Bintan dengan masyarakat Senggarang Kota Tanjungpinang terjadi pada tahun 2015.

Masyarakat nelayan di Kabupaten Bintan memiliki solidaritas yang tinggi, namun dalam bekerja mereka selalu melakukannya secara **individu**. Apabila bekerja berkelompok, mereka harus membagi hasil tangkapan sehingga hasil yang akan didapat semakin kecil dan biasanya tidak akan menutupi modal untuk turun ke laut.

Masyarakat Kabupaten Bintan sendiri relatif memiliki adaptabilitas dan tingkat keterbukaan yang cukup baik untuk pengenalan budaya maupun produk-produk baru. Potret keragaman budaya di Kabupaten Bintan menjadi pemicu utama. Interaksi antar kebudayaan yang dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok suku bangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Singgungan-singgungan peradaban yang selama ini dirasakan pada dasarnya telah membangun daya elastisitas bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Toleransi ini merupakan modal dasar pengembangan kepariwisataan yang lebih baik.

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bintan relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun berbagai upaya untuk peningkatan keamanan, ketertiban dan

penanggulangan kriminalitas terus dilakukan. Namun, untuk mencapai keamanan dan ketertiban secara penuh belum dapat diwujudkan. Hal itu tercermin dari masih berkembangnya berbagai persoalan sosial dan penyakit sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, kasus-kasus pencurian dan tindak kekerasan walaupun masih dalam skala yang dapat dikendalikan.

Kinerja peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas dapat digambarkan dari jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menurut kejadian. Pada tahun 2005 terjadi tindakan kriminalitas berjumlah 124 kasus, pada tahun 2006 berjumlah 68 kasus, pada tahun 2007 berjumlah 148 kasus, pada tahun 2008 berjumlah 112 kasus, pada 2009 berjumlah 139 kasus, pada 2010 berjumlah 113 kasus, pada 2011 berjumlah 116 kasus dan pada tahun 2012 berjumlah 116 kasus. Meskipun indeks kriminalitas di Kabupaten Bintan cenderung meningkat, namun berkat penanganan yang cepat dari aparat keamanan dan Pemerintah Daerah serta kesadaran masyarakat, masalah tersebut tidak sampai menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Hal ini terwujud berkat upaya kita dalam membangun sinergi antara tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan di setiap tingkatan.

6.2 Lingkungan Eksternal

6.2.1 Lingkungan Eksternal Makro

1) Faktor Fisik

Satu diantara faktor penunjang perkembangan pariwisata di Kabupaten Bintan adalah transportasi, kita akan sangat diuntungkan dengan penerbangan murah yang saat ini banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan baik nasional maupun internasional. Penerbangan murah telah berkembang pesat di regional ASEAN. Saat ini saja tercatat ada beberapa perusahaan penerbangan murah yang berbisnis di kawasan ASEAN. Akibatnya, pergerakan wisatawan intra ASEAN diperkirakan akan terus meningkat dan ini menuntut jenis produk wisata yang berbeda dengan pasar sebelumnya. Mudahnya dan murah nya moda transportasi jenis ini memberikan keuntungan besar bagi Kabupaten Bintan dalam meraih pasar-pasar regional maupun internasional. Pasar utama regional yang semula hanya di dominasi oleh Malaysia dan Singapura akan dapat berkembang lebih luas pada pasar regional lainnya. Kemudahan ini mendorong wisatawan mancanegara untuk mengunjungi destinasi lain selain destinasi-destinasi yang sudah mereka kenal sebelumnya. Ini mendorong tumbuhnya destinasi-destinasi baru yang dapat bersaing dengan destinasi – destinasi yang telah ada sebelumnya.

Hal yang sama berpengaruh pula pada tingkat pergerakan wisatawan nusantara. Murah dan mudah nya transportasi udara telah mendorong mobilitas penduduk untuk bepergian lebih jauh

dengan berbagai alasannya. Hal ini memberikan manfaat pula pada upaya pengembangan destinasi baru diluar Jawa, Sumatera dan Bali yang semula menjadi destinasi utama wisnus. Kemudahan transportasi ini telah menyebabkan tumbuhnya destinasi-destinasi baru khususnya di wilayah kepulauan di Indonesia, yang semakin mungkin untuk dapat dikunjungi oleh wisnus.

Walaupun dari sisi jumlah, baik wisman maupun wisnus, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang baik, namun dari sisi distribusi masih terjadi kesenjangan yang cukup besar. Jakarta dan Bali masih mendominasi kunjungan wisman, sedangkan kunjungan wisnus masih terkonsentrasi di Jawa. Data tahun 2011 menunjukkan bahwa Bali masih menikmati porsi kunjungan wisatawan terbesar, yaitu sebesar 47,32% diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 38,63% sedangkan sisanya dinikmati oleh daerah-daerah lainnya termasuk Kabupaten Bintan.

Persoalan lain adalah bahwa sistem perencanaan kepariwisataan nasional belum dilakukan secara terpadu. Dalam skala regional telah dilakukan pula perjanjian liberalisasi yang dibahas dalam Asean (*Association of South East Asia Nations Economic Community* (AEC/Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Artinya, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan di liberalisasi sepenuhnya, sementara

aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih ada keleluasaan, pengecualian dan hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut (Formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Kesepakatan ASEAN *Economic Community* (AEC) telah ditandatangani dan mulai berlaku pada 2015. Hal ini perlu segera disikapi melalui upaya pembenahan di sejumlah bidang dan sektor terkait dengan kinerja ekonomi nasional. Melalui komunitas ekonomi ASEAN telah disepakati akan dihapus segala bentuk tarif, jaminan mobilitas tenaga kerja yang berkualitas (*skilled labor force*) dan jaminan mobilitas modal. Belajar dari *Asean-China Free Trade Agreement* (AC-FTA), maka Indonesia khususnya Kabupaten Bintan perlu berkegas mempersiapkan diri menghadapi AEC. Mobilitas modal yang bebas justru akan semakin meningkatkan pola persaingan untuk mendapatkan *foreign direct investment* (FDI) bagi negara-negara ASEAN. Pola kompetisi akan semakin tinggi ketika terdapat kesamaan bidang investasi.

Saat ini ASEAN telah menyusun cetak biru pariwisata (ATSP, *Asean Tourism Strategic Plan 2011-2015*) melalui progres kerjasama strategik di bidang pemasaran, pengembangan produk,

dan peningkatan kualitas sumber daya. Kerjasama tersebut bertujuan untuk dapat lebih mendorong peningkatan kunjungan wisatawan internasional ke ASEAN melalui kolaborasi pembangunan pariwisata antar negara. ASEAN berharap agar dapat menjadi sebuah destinasi tunggal yang dapat menarik kunjungan yang lebih besar dari negara-negara lainnya. Bentuk kerjasama, disamping promosi regional, dilakukan pula melalui upaya pengembangan paket wisata bekerjasama dengan ASEANTA (ASEAN Tourism Association). Pengembangan paket wisata yang telah mulai dikerjasamakan dalam tahun 2012 adalah berupa paket wisata berbasis pada alam (*nature-based*), berbasis pada budaya (*culture and heritage*), berbasis masyarakat (*community based*) dengan dan berbasis kapal pesiar dan sungai (*cruis-based dan river-based*). Kerjasama lainnya adalah dalam bentuk kerjasama budaya antar 6 negara dalam kemasan ToC (*Trail of Civilization*) yang melibatkan negara-negara Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Serta kerjasama *World Heritage Sites* antara Malaysia dan Yogyakarta.

2) Faktor Ekonomi

Menurut Kementerian PPN RI Tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 diperkirakan mencapai 3,9 persen, lebih tinggi dari realisasi tahun 2017, didorong oleh harga komoditas yang masih mengalami peningkatan. Hal ini mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi pada negara-negara pengekspor komoditas.

Selain itu, pertumbuhan negara-negara maju juga diperkirakan mengalami peningkatan pada tahun 2018, diantaranya Amerika Serikat dan Kawasan Eropa. Pertumbuhan negara-negara berkembang juga diprediksi terus mengalami peningkatan didorong oleh peningkatan harga komoditas

Amerika Serikat diproyeksi tumbuh mencapai 2,9 persen pada tahun 2018, dari sebelumnya tumbuh 2,3 persen tahun 2017. Penguatan permintaan eksternal dan ekspektasi terhadap dampak dari reformasi pajak pada bulan Desember 2017 masih menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Pada tahun 2019, pertumbuhan Amerika Serikat diperkirakan lebih moderat sebesar 2,7 persen.

Pertumbuhan kawasan Eropa diperkirakan tumbuh sebesar 2,4 persen tahun 2018, seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan eksternal, serta kebijakan moneter yang mendukung. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kawasan Eropa diperkirakan tumbuh lebih moderat sebesar 2,0 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jepang diproyeksikan tumbuh moderat mencapai 1,2 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan Jepang didorong oleh peningkatan prospek permintaan eksternal, peningkatan investasi swasta, dan penambahan anggaran pada tahun 2018. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang tahun 2019 juga masih sama dengan perkiraan sebelumnya sebesar 0,9 persen. Sedangkan menurut ADB, pertumbuhan Jepang pada tahun 2018 sebesar 1,4 persen dan 1,0 persen pada tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksi tumbuh sebesar 6,6 persen tahun 2018, lebih rendah dari realisasi tahun 2017 yang mencapai 6,9 persen. Sedangkan menurut proyeksi ADB, pertumbuhan Tiongkok tumbuh 6,6 persen pada tahun 2018 dan 6,4 persen pada tahun 2019. Tiongkok masih dihadapkan pada berlanjutnya penyeimbangan investasi dari industri dan jasa menjadi konsumsi. Namun demikian, permintaan eksternal yang meningkat diperkirakan akan mendorong peningkatan ekspor Tiongkok. Pada tahun 2019, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh sebesar 6,4 persen.

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Menurut ADB, Tahun 2017-2019

	Pertumbuhan PDB (%)		
	Perkiraan		
	2017	2018	2019
Asia	6,1	6	5,9
Asia Timur	6,3	6	5,8
Tiongkok	6,9	6,6	6,4
Jepang	1,7	1,4	1
Asia Selatan	6,4	7	7,2
India	6,6	7,3	7,6
ASEAN	5,2	5,2	5,2
Indonesia	5,1	5,3	5,3
Filifina	6,7	6,8	6,9
Thailand	3,9	4	4,1

Sumber: Kementerian PPN RI Tahun 2018

Laju inflasi di negara maju secara umum mulai mengalami peningkatan, misalnya inflasi Amerika Serikat yang meningkat dari sebelumnya mencapai 2,5 persen (YoY) pada bulan April tahun 2018. Hal ini didorong oleh peningkatan harga makanan yang meningkat sebesar 0,3 persen. Selain itu harga bahan bakar juga mengalami peningkatan sebesar 3,0 persen pada bulan April 2018. Namun, di Jepang penurunan harga komoditas energi dan alat elektronik, seperti telepon seluler, menjadi pendorong terbesar menurunnya inflasi. Inflasi Jepang pada bulan April 2018 mencapai 0,6 persen, dibawah target bank sentral sebesar 2,0 persen.

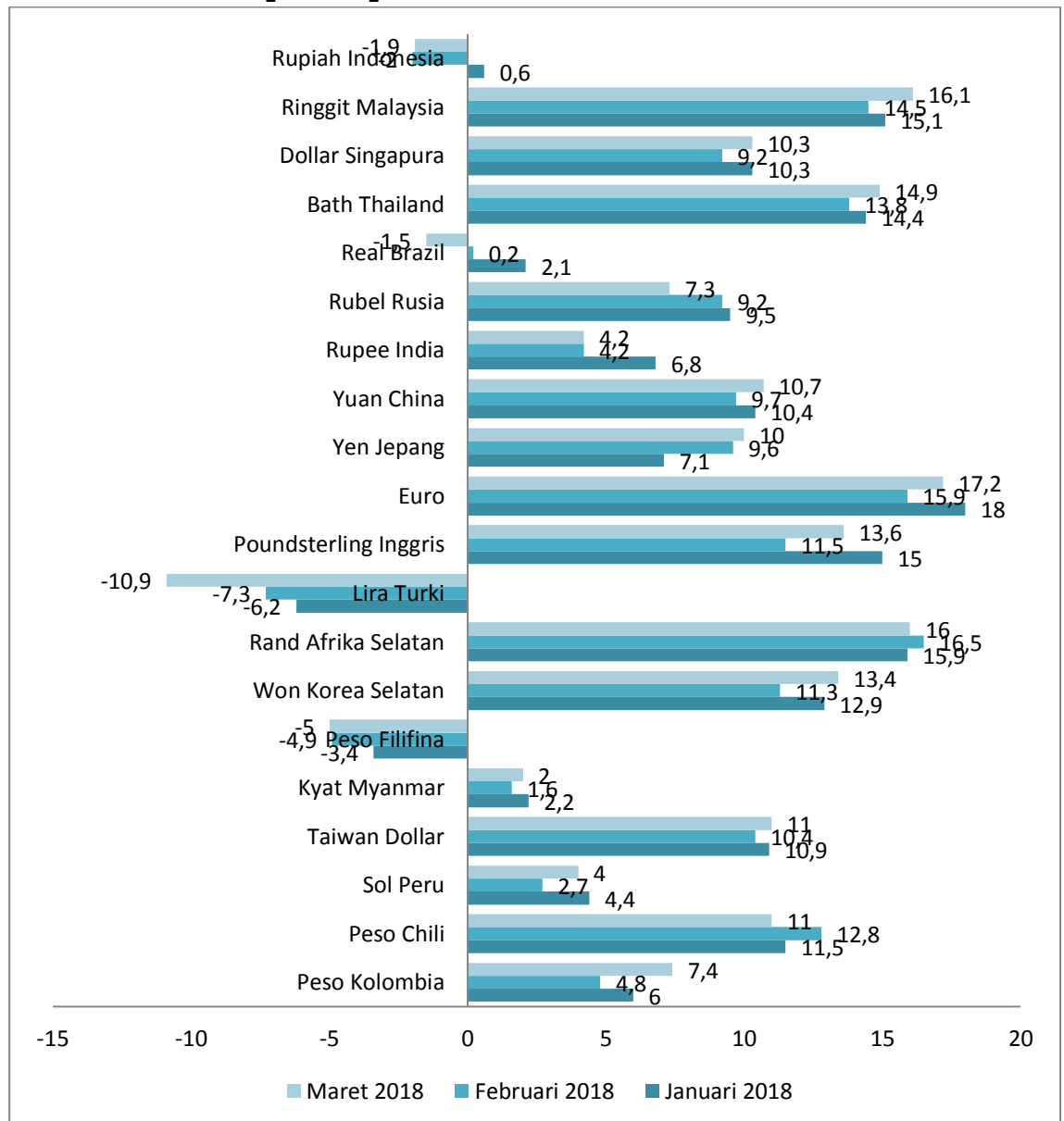
Tabel 6.2 Tingkat Inflasi Global Triwulan I Tahun 2018

		Januari	Februari	Maret	April
Indonesia		3,3	3,2	3,4	3,4
BRIC					
	Brazil	2,9	2,8	2,7	2,8
	Rusia	2,2	2,2	2,4	2,4
	India	3	2,7	2,5	3,2
	China	1,5	2,9	2,1	1,8
ASEAN					
	Singapura	0	0,5	0,2	0,2
	Malaysia	2,7	1,4	1,3	1,3
	Thailand	0,7	0,4	0,8	1,1
	Filipina	3,4	3,8	4,3	4,5
	Vietnam	2,7	3,2	2,7	2,8
Negara Maju					
	Kawasan Euro	1,3	1,1	1,3	1,2
	Amerika Serikat	2,1	2,2	2,4	2,5
	Inggris	3	2,7	2,5	2,5
	Jepang	1,4	1,5	1,1	0,6

Sumber: Kementerian PPN RI Tahun 2018

Sepanjang triwulan I tahun 2018, mata uang beberapa negara di dunia mengalami depresiasi terhadap Dolar AS. Peso Filipina, Lira Turki, Real Brazil, dan Rupiah Indonesia termasuk yang mengalami depresiasi nilai tukar terhadap Dolar AS pada triwulan I tahun 2018. Depresiasi Peso disebabkan oleh kenaikan impor bahan bakar seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur di Filipina. Selain itu, tingkat inflasi yang meningkat juga menjadi pendorong depresiasi Peso. Lira Turki mengalami depresiasi sepanjang triwulan I tahun 2018 yang mencapai 5,2 persen terhadap Dolar AS. Hal ini merupakan kondisi terburuk sepanjang triwulan I dimana sampai bulan Maret tahun 2018 Lira Turki masih terus mengalami depresiasi. Hal ini didorong oleh kombinasi beberapa faktor seperti penguatan Dolar AS, defisit transaksi berjalan Turki yang memburuk, pemilihan umum presiden di Turki, dan tingkat suku bunga yang ditahan untuk tidak meningkat menjadi salah satu pendorong melemahnya nilai tukar Lira terhadap Dolar AS. Peso Filipina mengalami depresiasi sepanjang triwulan I tahun 2018. Hal ini didorong oleh faktor musiman dimana sepanjang triwulan I tahun 2018 merupakan periode impor yang menyebabkan tren impor meningkat jauh lebih tinggi. Hal ini mendorong permintaan terhadap Dolar AS yang meningkat. Begitu juga ekspektasi peningkatan tingkat suku bunga The Fed juga menjadi salah satu faktor pendorong pelemahan mata uang Peso Filipina terhadap Dolar AS.

Gambar 6.8 Apresiasi dan Depresiasi Nilai Tukar Mata Uang terhadap USD per Akhir Januari-Maret 2018



Sumber: Kementerian PPN RI Tahun 2018

3) Faktor Sosial

Dunia berkembang dan terus berubah tanpa ada yang bisa mengontrol gerak lajunya. Perkembangan yang dimaksud kini memasuki era revolusi industri 4.0 di mana dunia terasa menjadi semakin mudah dijangkau, dunia saat ini semakin mengglobal, di

mana segala informasi, modal, dan kebudayaan bergerak secara cepat, tanpa halangan batas-batas kedaulatan. Kemajuan tersebut dinamakan sebagai globalisasi. Banyak orang melihat secara optimis kapitalisme global yang bernaung di bawah globalisasi, menganggapnya sebagai sebuah tatanan yang menyatukan segala masyarakat dalam berperang melawan kemiskinan dan kemelaratan.

Namun kemajuan dunia saat ini tidak berbanding lurus dengan ketimpangan, jurang pemisah antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Dunia terbagi dalam kutub negara-negara kaya dan pemodal di sisi utara dan kutub negara miskin dan peminjam modal di sisi selatan. Kemajuan yang didengungkan tidak bisa secara merata dinikmati oleh semua orang. Selain itu, dengan dunia yang semakin disatukan oleh berbagai kemajuan teknologi dan pasar bebas, terdapat kecenderungan masyarakat yang semakin konsumtif.

Saat ini dalam memanfaatkan waktu luang, masyarakat dunia cenderung untuk mengunjungi Negara/daerah lain atau sering disebut dengan traveling serta berorientasi gaya hidup fun. Perjalanan yang dilaukan dilakukan diluar Negara/luar daerah, tujuannya bersenang-senang atau tidak mencari nafkah di Negara/daerah tujuan atau semata-mata menjadi konsumen. Dalam berpergian, telah terjadi perubahan dalam mencari daerah tujuan berwisata dari destinasi yang modern berubah menjadi destinasi yang memiliki kekhasan dan keunikan. Kekhasan dan

keunikan tersebut dilihat dari pemandangan alam, fasilitas, budaya dan social masyarakat.

4) Faktor Politik dan Hukum

Kebijakan perdagangan yang proteksionis menjadi pilihan Trump untuk mengatasi masalah ekonomi Amerika Serikat. Pengenaan tarif impor yang merupakan temporary safeguard measures dilatarbelakangi oleh laporan kerugian sejumlah perusahaan domestik yang memproduksi barang sejenis. Besaran tarif impor yang dikenakan semakin menurun dalam tiga tahun ke depan dan disesuaikan dengan volume impor. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat berpotensi memicu tindakan retaliasi yang mengarah pada trade war. Sejumlah negara telah bereaksi terhadap langkah Amerika Serikat tersebut. Canadian solar company mengajukan gugatan hukum, serta EU, Tiongkok, Taiwan dan Korea Selatan meminta kompensasi atas pengenaan tarif. Tiongkok juga menginisiasi investigasi subsidi produk pertanian Amerika Serikat (sorghum) dan mengancam akan menghambat impor kedelai dari Amerika Serikat.

Faktor risiko terhadap progres pemulihan ekonomi Kawasan Euro saat ini sudah cukup berimbang (balanced). Upside risks terutama berasal dari momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan estimasi sebelumnya, dengan didukung oleh sentimen kepercayaan ekonomi yang terus membaik. Pemulihan ekonomi global juga menjadi faktor pendukung yang kuat dari

eksternal. Program reformasi struktural Uni Eropa mulai memperlihatkan dampak positif terhadap kestabilan pertumbuhan dan momentum pemulihan. Risiko politik di kawasan juga terus mereda dan mengonfirmasi Kawasan Euro memiliki daya tahan terhadap gejolak politik.

Namun demikian, risiko politik belum sepenuhnya tereleminasi karena terjadinya beberapa event politik di 2018. Pemerintahan Jerman di bawah Angela Merkel saat ini belum stabil karena masih merupakan minoritas dan sedang melakukan negosiasi koalisi dengan partai lainnya. Pemilu Italia –berdasarkan survei terkini– masih didominasi oleh partai sayap kanan maupun koalisi centre-right. Selain itu, keberlanjutan negosiasi Brexit juga masih menjadi tantangan karena masih menemui beberapa hambatan. Sementara dari sisi eksternal, risiko dari ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat khususnya kebijakan fiskal serta kecenderungan peningkatan proteksionisme berpotensi memicu konflik perdagangan dan menghambat laju pemulihan global. Selain Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok juga berpotensi termaterialisasi serta memengaruhi eksposur perdagangan dan investasi Eropa dengan Tiongkok.

Ekonomi Inggris ke depan masih diliputi sejumlah risiko, baik yang berasal dari domestik maupun eksternal. Dari sisi domestik, ketidakpastian negosiasi Brexit antara Inggris dan EU menjadi risiko utama bagi perekonomian Inggris, terutama terkait aspek pengaturan perdagangan internasional yang akan memengaruhi

aktivitas bisnis, rumah tangga, dan pelaku pasar keuangan. Penurunan upah riil masyarakat dapat menurunkan aktivitas konsumsi. Dari sisi ketenagakerjaan, terdapat risiko berkurangnya tenaga kerja unskilled akibat rencana pemerintah untuk membatasi ijin tinggal imigran EU di Inggris hanya selama dua tahun. Sementara itu, kredit rumah tangga yang masih tergolong tinggi di tengah pendapatan yang tumbuh melambat berpotensi meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan domestik. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Inggris antara lain dinamika ekonomi dan arah kebijakan proteksionisme perdagangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, rencana kenaikan FFR, pergerakan harga minyak dunia dan tensi geopolitik.

Ekonomi Jepang ke depan masih dihadapkan pada sejumlah risiko, baik dari sisi domestik maupun eksternal. Risiko domestik berasal dari persoalan aging population, kekhawatiran sustainabilitas kebijakan fiskal, perkembangan upah yang lambat, serta perubahan sentimen konsumsi di tengah wacana pemberlakuan kenaikan pajak konsumsi pada 2019. Sumber risiko lainnya adalah insentif keringanan pajak pembelian kendaraan eco-car yang akan dikurangi secara bertahap pada pertengahan 2018 berpotensi menurunkan penjualan kendaraan. Sementara faktor eksternal yang membayangi outlook ekonomi Jepang berasal dari pengetatan kebijakan moneter AS, proteksionisme perdagangan AS, ketidakpastian negosiasi Brexit,

gejolak politik di Eropa, dan proses rebalancing ekonomi Tiongkok. Ketidakpastian juga berasal dari faktor geopolitik, khususnya masalah Korea Utara. Imbas dari berbagai faktor tersebut terhadap pasar keuangan maupun pasar modal akan sangat memengaruhi dinamika ekonomi Jepang sebagai salah satu negara safe haven.

Faktor risiko yang akan memengaruhi kinerja ekonomi Tiongkok relatif balanced, dengan kecenderungan pada risiko yang akan menahan pertumbuhan (downside risks). Ketergantungan pada permintaan eksternal meningkatkan kerentanan, di tengah pengetatnya kondisi pasar tenaga kerja di negara maju—slack pertumbuhan mengecil. Selain itu, kebijakan inward looking seperti proteksionisme AS dan proses Brexit berpotensi menambah risiko, meskipun diperkirakan bersifat sektoral. Risiko berpotensi terjadi pada produk yang dikenakan restriksi. Lebih lanjut, pelaksanaan reformasi perpajakan di AS dapat memicu pace pengetatan yang lebih cepat oleh the Fed—terutama jika kenaikan inflasi AS lebih tajam. Apabila risiko-risiko tersebut terealisasi maka dapat berdampak negatif pada perdagangan, produksi, dan stabilitas sistem keuangan Tiongkok. Downside risk domestik bersumber dari tingkat utang yang semakin tinggi serta pelaksanaan reformasi struktural yang semakin intensif. Namun intensifikasi reformasi struktural diperkirakan bersifat tail-risk karena pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok memiliki komitmen yang kuat terhadap stabilitas pertumbuhan. Sementara

itu, upside risk yang dapat mendorong pertumbuhan berasal dari penguatan momentum recovery di negara maju. Dari dalam negeri, dorongan terhadap pertumbuhan (tail wind) dapat muncul jika terjadi kesepakatan politik diantara para pemimpin Tiongkok untuk memperkuat pertumbuhan—dengan sedikit mengorbankan reformasi struktural.

Pencapaian positif Indonesia tidak terlepas dari hasil sinergi kebijakan BI dan Pemerintah yang telah berjalan baik selama ini. Di sektor fiskal, Pemerintah telah menjalankan reformasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pengeluaran anggaran terutama untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor riil, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan merevisi ketentuan terkait investasi infrastruktur guna mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Sementara itu, Bank Indonesia senantiasa mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Gambar 6.9 Daftar Proyek Strategis Nasional 2015-2019



Sumber: Bank Indonesia, 2018

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 adalah bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Kemudian didalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan pada beberapa bidang, satu diantaranya adalah industri pariwisata Desa. Sedangkan pertumbuhan Dana Desa tahun 2017 naik menjadi Rp 60 triliun dari tahun sebelumnya 2016 hanya sebesar Rp 46,98 triliun.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini

menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5) Faktor Teknologi

Teknologi-teknologi yang disruptif bisa menjadi peluang bagi negara-negara berkembang, tetapi hanya jika negara-negara tersebut mampu mengambil manfaat dari teknologi-teknologi tersebut. Banyak negara yang tidak memiliki kerangka kerja hukum dan peraturan maupun keterampilan dan perusahaan-perusahaan yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi teknologi. Pemerintah di berbagai negara saat ini mengidentifikasi kendala-kendala dalam pembangunan yang diprakarsai oleh teknologi. Tinjauan Belanja Publik untuk Sains, Teknologi, dan Inovasi, misalnya, merupakan sebuah alat diagnostik baru untuk membantu pemerintah merumuskan strategi yang tepat, mengadopsi praktik-praktik baik, dan meningkatkan koordinasi mengenai kebijakan-kebijakan inovasi.

Bank Dunia memaparkan bagaimana teknologi tengah mengubah kriteria untuk menjadi lokasi manufaktur yang diinginkan. Perusahaan-perusahaan yang dulu terpengaruh oleh prospek biaya tenaga kerja yang murah mulai cenderung memilih lokasi-lokasi yang dapat memanfaatkan teknologi secara lebih baik.

Negara-negara didorong untuk berfokus pada tiga dimensi: daya saing, kemampuan, dan keterhubungan. Hal ini termasuk pergeseran fokus dari upah rendah ke pertimbangan yang lebih luas terhadap lingkungan usaha, aturan hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan transaksi-transaksi keuangan dalam mengembangkan ekosistem perusahaan; melengkapi para pekerja dengan keterampilan-keterampilan baru, membangun perusahaan-perusahaan yang lebih kuat, dan mengembangkan infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi baru; serta meningkatkan logistik dan menurunkan pembatasan perdagangan terhadap barang dan jasa manufaktur. Negara-negara perlu memastikan bahwa ekonomi mereka siap untuk teknologi masa depan. Tetapi mereka juga perlu memastikan bahwa mereka menanamkan investasi terbaik pada sumber daya manusia mereka, sehingga siap untuk berperan serta.

6) Faktor Demografis

Tahun 2017, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan jumlah penduduk dunia berjumlah 7,6 milyar, dan memprediksi pada tahun 2030 berjumlah 8,6 milyar, tahun 2050 berjumlah 11,2 milyar. PBB juga memprediksikan jumlah penduduk India akan melampaui China tujuh tahun kedepan serta Nigeria akan melampaui Amerika Serikat pada tahun 2050. Selanjutnya PBB memprediksi setengah dari pertumbuhan penduduk global dari

tahun 2017-2050 akan berlangsung di Afrika dan populasi Eropa akan sedikit menurun pada beberapa decade kedepan.

6.2.2 Lingkungan Internal Mikro

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal makro yaitu:

1) Pendatang Baru

Saat ini daerah mulai berbenah melakukan program pembangunan pariwisata. Sector pariwisata dijadikan sebagai sumber PAD yang terbarukan dan tidak akan pernah habis. Di Kepulauan Riau selain Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas melirik potensi pariwisata bahari. Dengan di nobatkannya sebagai pulau terindah se Asia dan berhasil membuat banyak wisatawan merasa penasaran. Pulau bawah juga telah menjadi tempat penyelaman terpopuler karena ekosistem dan habitatnya masih asli. Untuk mengunjunginya sangat mudah, Pulau bawah bisa diakses dengan menggunakan seaplane dari Bandara Hang Nadim Batam.

Sedangkan di Kabupaten Natuna, Alif Stone Park tahun 2018 sebagai pemenang Anugrah Pesona Indonesia dinyatakan paling populer di Indonesia. Alif Stone memiliki daya tarik tersendiri yaitu dengan hamparan batu besar sepanjang pesisir pantai dan pemberian nama tersebut berasal dari sebuah batu yang berdiri tegak berbentuk huruf alif. Wisatawan mancanegara untuk mengunjungi tempat ini biasa menggunakan kapal yacht. Untuk

berkunjung ke Natuna sangat mudah dengan menggunakan pesawat dari Tanjungpinang dan Batam yang terjadwal setiap hari.

Sektor pariwisata di Indonesia menurut Lestari dan Adi (2015) dalam menghadapi pendatang baru menunjukkan beberapa poin penting, yaitu: pertama untuk memasuki industri pariwisata, dibutuhkan pemasaran yang baik dan efektif sehingga masing-masing negara dapat menarik wisatawan untuk datang ke negaranya. Kebanyakan wisatawan akan merujuk pada rekomendasi dari kerabat dan keluarga, serta media yang sudah dikenal namanya seperti Lonely Planet. Tanpa adanya pemasaran yang baik maka akan sulit bagi suatu negara untuk menarik wisatawan datang sehingga tidak mampu menciptakan efek domino yang dihasilkan dari rekomendasi kepada orang lain. Pemerintah berusaha untuk mempromosikan keindahan Indonesia lewat berbagai macam media dengan slogan Wonderful Indonesia. Lewat situs <http://www.indonesia.travel>, Indonesia optimis bahwa pemasaran yang dilakukan mampu membuat Indonesia bertahan dari ancaman pendatang baru. Kedua pendatang baru akan terkendala dalam memastikan kecukupan jaringan distribusi untuk menciptakan kecukupan supply pendukung industri pariwisata. Ketiga kebijakan suatu negara dalam menetapkan kelonggaran ijin masuk ke negaranya, kebijakan terkait jalur transportasi, pembangunan infrastruktur, serta harga tiket masuk ke objek wisata akan berpengaruh kepada

tinggi atau rendahnya ancaman dari pendatang baru terhadap industri pariwisata di Indonesia. Dalam era kepemimpinan presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dijadikan sebagai prioritas utama. Hal ini mendukung sektor pariwisata di Indonesia untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menetapkan bahwa pariwisata menjadi sektor prioritas pembangunan, bersama dengan sektor prioritas lain, seperti pangan, energi dan maritime.

2) Pemasok

Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau pengurangan kualitas produk atau jasa. Industri pariwisata pada umumnya merupakan industri jasa maka pemasok bagi industri pariwisata dapat diartikan sebagai industri pendukung. Adapun pelaku di industri pendukung ini seperti hotel, travel agent, transportasi, infrastruktur sangat dibutuhkan untuk bisa memaksimalkan pelayanan kepada konsumen. Sebagai contoh: akses yang mudah dan nyaman bagi wisatawan untuk bisa sampai di lokasi tempat wisata ditentukan oleh optimalisasi dari industri pendukung ini. Industri pendukung di atas tidak hanya dibutuhkan bagi industri pariwisata tetapi juga bagi industri lain. Hal ini menyebabkan industri pendukung tersebut memiliki kekuatan tawar menawar yang tinggi, dikarenakan keberadaan mereka tidak hanya semata-mata berperan sebagai pemasok bagi industri pariwisata. Hal ini

menyebabkan industri pariwisata lebih lemah posisi tawar menawarnya dibandingkan dengan industri pendukung, selaku pemasoknya. Dengan munculnya berbagai macam perusahaan yang mengambil konsep “sharing economy” sedikit banyak membantu sektor pariwisata untuk bisa terus berkembang. Air Bnb, Gojek dan Uber merupakan contoh dari sektor pendukung yang akan membantu wisatawan untuk mendapatkan akomodasi dan transportasi. Sebagai contoh: pada tanggal 9 Maret 2016 gerhana matahari terjadi dan Belitung merupakan salah satu lokasi dimana wisatawan dapat melihat fenomena gerhana matahari total. Permintaan akomodasi dan tiket pesawat menuju Belitung meningkat secara tajam. Akan tetapi peningkatan permintaan akomodasi tersebut tidak disertai dengan meningkatnya jumlah penginapan di Belitung. Berkat adanya konsep sharing economy, warga Belitung dapat menyewakan rumahnya kepada wisatawan agar wisatawan tersebut dapat tetap menikmati gerhana matahari total (Lestari dan Adi:2015).

Henry Ali Siregar Pengelola kebersihan Banyan Tree menyampaikan pada Rapat Kerja Bidang Perekonomian Sekda Kabupaten Bintan dengan tema Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Lokal bahwa “wisatawan asing yang berkunjung ke Kawasan Wisata Lagoi saat ini telah jenuh berkeliling Lagoi, mereka terkadang ingin melihat budaya masyarakat sekitar.” Hal ini dipertegas lagi oleh Dahsyat Gafnesia Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Bintan wisatawan yang

berasal dari Eropa, Asia Timur dan Amerika sangat senang dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Bintan, walaupun hanya memberikan ayam makan.

Dengan demikian, diharapkan Kawasan Wisata Lagoi bisa menjadi motor penggerak bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke kawasan objek wisata bahari berbasis masyarakat.

3) Pembeli/pelanggan

Dalam kegiatan di sektor pariwisata, sejumlah dampak negatif dapat muncul. dampak-dampak negatif tersebut harus dapat diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang bagi suatu destinasi pariwisata. Pertama, ketika suatu wilayah tertentu berkembang menjadi destinasi pariwisata, maka permintaan akan produk lokal dan tanah di wilayah tersebut akan meningkat, sehingga harga akan terus meningkat. Sebagai contoh, jika pakaian tradisional di suatu daerah sangat diminati oleh wisatawan, maka peningkatan harga secara berkelanjutan akan menyebabkan penduduk setempat tidak lagi mampu membeli pakaian tradisional mereka sendiri dan mungkin harus beralih untuk memakai pakaian dengan kain yang harganya jauh lebih murah tetapi merupakan produk impor.

Kedua, lingkungan dan keindahan alam akan hilang dan digantikan dengan bangunan infrastruktur dan hotel; kemudian sejumlah besar orang asing dengan sedikit pengetahuan dan penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal lokal dapat menyebabkan ketegangan sosial; mungkin dengan adanya

kegiatan prostitusi dan penyakit yang berhubungan dengan seks; dan ekonomi lokal dapat terganggu karena tenaga kerja tersedot dari pertanian ke sektor pariwisata.

Berdasarkan penelitian Kadir dan Karim (2009) menemukan bahwa wisatawan Amerika Serikat dan Inggris ke Malaysia kenaikan harga mempengaruhi berkurangnya minat para wisatawan mancanegara berkunjung ke Malaysia. Hasil penelitian Sondakh dan Tumbel (2016) menyimpulkan bahwa pelayanan, keamanan dan daya tarik objek wisata mempengaruhi minat wisatawan berkunjung ke objek wisata alam Gunung Mahawu. Pelayanan yang baik akan membuat wisatawan berkunjung kembali, wisatawan akan memperhatikan infrastruktur yang aman sedangkan dari daya tarik, kelestarian alam harus dijaga. Hasil penelitian Syahrul (2015) menyimpulkan daya tarik, fasilitas dan kemudahan aksesibilitas mempengaruhi keputusan wisatawan mancanegara untuk berkunjung kembali.

4) Produk Pengganti

Produk maupun jasa substitusi dari pariwisata bentuknya sangat bervariasi dan tidak dapat dihubungkan secara langsung sebagai pengganti pariwisata. Akan tetapi meskipun karakteristiknya berbeda, barang substitusi tersebut dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Kegiatan berbelanja di pertokoan terkemuka, salon perawatan kecantikan serta industri hiburan seperti clubbing dianggap dapat dijadikan produk atau jasa pengganti pariwisata. Keterbatasan anggaran serta waktu yang terbatas

seringkali membuat konsumen untuk memilih barang dan jasa substitusi dibandingkan pariwisata. Akan tetapi bagi sebagian besar konsumen kegiatan berbelanja dan clubbing tersebut tidak bisa dijadikan sebagai substitusi pariwisata. Mereka lebih memilih untuk menyesuaikan tujuan wisata dengan anggaran yang mereka punya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman substitusi untuk pariwisata tidaklah besar (Lestari dan Adi:2015).

5) Pesaing dalam Industri

Untuk periode tahun 2014/2015, daya saing pariwisata Indonesia di kawasan ASEAN berada pada peringkat ke-4 dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand, sedangkan untuk daya saing pariwisata secara global, Indonesia berada pada peringkat ke-50 (WEF, 2015). Meskipun telah mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan periode sebelumnya dimana daya saing pariwisata global Indonesia berada pada peringkat ke-70, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut karena potensi pariwisata Indonesia yang begitu besar belum maksimal pengembangannya. Untuk itu penting mengetahui terlebih dahulu tentang kondisi daya saing pariwisata Indonesia, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang tepat.

Secara garis besar, kondisi sektor pariwisata Indonesia dalam menghadapi persaingan negara lain adalah sebagai berikut: Pertama industri pariwisata menawarkan jenis jasa ataupun produk yang tidak terlalu bervariasi. Sebagai contoh, setiap sektor yang bergerak di bidang pariwisata pada umumnya menawarkan

jasa penginapan, penyewaan kendaraan, tiket transportasi umum. Sehingga tanpa competitive advantage, industri pariwisata di Indonesia akan sulit untuk bersaing dengan industri pariwisata di negara lain. Kedua wisatawan yang berasal dari belahan dunia lain, biasanya akan mengunjungi lebih dari satu negara ketika mereka berwisata. Dikarenakan perusahaan-perusahaan dalam industri pariwisata di Indonesia kebanyakan berskala kecil, maka layanan jasa maupun produk yang diberikan masih berskala nasional. Hal ini menyebabkan industri pariwisata di Indonesia kehilangan potensi pendapatan ketika mereka tidak dapat menyediakan jasa maupun produk di luar Indonesia. Untuk mengatasinya Indonesia dapat mempermudah akses pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di bidang pariwisata untuk bisa beraliansi dengan perusahaan di luar negeri. Ketiga meskipun Indonesia merupakan negara dengan GDP tertinggi di Asia Tenggara di tahun 2015, kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia terbilang belum maksimal bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan penelitian tahap I, diketahui pada tahun 2015 secara rata-rata, kontribusi pariwisata negara-negara Asia Tenggara terhadap GDP adalah sekitar 13.03%. sedangkan kontribusi pariwisata Indonesia terhadap GDP adalah sekitar 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa industri pariwisata di Indonesia belum optimal dalam menyokong GDP di Indonesia (Lestari dan Adi:2015).

	Faktor Internal	
	Strengths	Weaknesses
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alam destinasi pariwisata bahari sangat unik, natural dan indah baik di atas maupun di bawah permukaan laut 2. Aktivitas wisata bahari beragam: mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, history dan cinta terhadap alam 3. Tersedianya data asal dan waktu kunjungan wisatawan. 4. Telah ada branding “Bintan Breathtaking Journey” 5. Bintan sebagai kawasan Strategis Pariwisata Nasional 6. Promosi telah dilakukan oleh PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) 7. Menjamurnya paket oneday trip 8. Promosi dilakukan menggunakan media social dan website 9. Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relative aman terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami dan letusan gunung berapi 10. Tahun 2018, 36 kantor desa di seluruh Kabupaten Bintan terkoneksi dengan internet 11. Masyarakat nelayan telah membagi pekerjaan mereka berdasarkan gender, untuk laki-laki wilayah kerjanya di laut dan memiliki solidaritas yang tinggi 12. uniknya hubungan patron-klien yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bintan sangat membantu masyarakat nelayan dalam menyediakan kebutuhan 13. Masyarakat memahami batasan-batasan yang ada serta memahami nilai ekonomis dari sumber daya yang bersifat open access serta adaptabilitas dan tingkat keterbukaan yang cukup baik 14. kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bintan relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat 15. aksesibilitas dari dan menuju ke Kabupaten Bintan baik domestik maupun internasional sudah tersedia dengan baik 16. berkembangnya akomodasi murah (budget hotel) di Kabupaten Bintan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola pariwisata bahari berbasis masyarakat belum menggunakan paid media (media berbayar) dan own media (media milik sendiri) 2. Pemerintah Kabupaten Bintan masih memfokuskan kegiatan pengembangan pariwisata di Lagoi yang memiliki dampak langsung terhadap PAD 3. Terbatasnya SDM yang memiliki kepakaran di bidang pariwisata sehingga mutu produk dan kualitas wisata bahari rendah 4. Pariwisata bahari masih diinisiasi oleh masyarakat pendatang 5. Sebagai nelayan, masyarakat belum menjadikan sector pariwisata sebagai mata pencarian tambahan atau belum ada pergeseran mata pencarian 6. Konflik antar masyarakat nelayan dalam memperebutkan wilayah tangkap 7. Masyarakat nelayan tidak bisa bekerja mencari nafkah secara berkelompok 8. Dukungan moda transportasi darat dan laut skala lokal masih belum tersedia secara regular 9. Belum adanya pedoman pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat 10. pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil

Faktor Eksternal	<p>Opportunities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerbangan murah ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan baik nasional maupun internasional 2. ASEAN <i>Economic Community</i> (AEC) pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan di liberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya 3. <i>Asean Tourism Strategic Plan</i> mendorong peningkatan kunjungan wisatawan internasional ke ASEAN 4. Membaiknya pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia dan global 5. Apresiasi nilai tukar mata uang terhadap Dollar AS negara-negara maju 6. era revolusi industri 4.0 di mana dunia terasa menjadi semakin mudah dijangkau, informasi, modal, dan kebudayaan bergerak secara cepat, tanpa halangan batas-batas kedaulatan 7. masyarakat dunia cenderung untuk traveling ke Negara/daerah lain serta berorientasi gaya hidup fun 8. risiko yang akan memengaruhi kinerja ekonomi Tiongkok relatif balanced 9. Di sektor fiskal, Pemerintah Indonesia telah menjalankan reformasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pengeluaran anggaran terutama untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 10. Kemajuan teknologi menjadi peluang Negara berkembang sebagai alat diagnostik pemerintah merumuskan strategi yang tepat, mengadopsi praktik-praktik baik, dan meningkatkan koordinasi mengenai kebijakan-kebijakan inovasi dalam meningkatkan daya saing, kemampuan dan keterhubungan. 11. jumlah penduduk dunia berjumlah 7,6 milyar, dan memprediksi pada tahun 2030 berjumlah 8,6 milyar, tahun 2050 berjumlah 11,2 milyar. 12. 40 Persen (%) Dana Desa direkomendasikan untuk 4 (empat) program prioritas pembangunan desa 	<p>S-O (Strategi Agresif)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membangun kapasitas pariwisata berbasis masyarakat/CBT berikut dengan kelembagaan, motivasi dan mentalitas. 2. Membangun kelembagaan BUMDES dengan pola <i>Holding Company</i> 3. Rintisan destinasi wisata baru berbasis desa wisata 	<p>W-O (Strategi Penyehatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi dan diservikasi objek wisata bahari di Kabupaten Bintan 2. Fasilitasi sarana pendukung seperti jalan, transportasi, komunikasi dan sanitasi
	<p>Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bali dan Jakarta masih mendominasi kunjungan wisman dan wisnus sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar 2. inflasi di negara maju dan Indonesia secara umum mulai mengalami peningkatan 3. mata uang beberapa negara di dunia termasuk Indonesia mengalami depresiasi terhadap Dolar AS 4. risiko dari ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat khususnya kebijakan fiskal serta kecenderungan peningkatan proteksionisme 5. risiko politik dunia belum sepenuhnya tereleminasi karena terjadinya beberapa event politik tahun 2018 6. Pulau bawah, alif stone 7. Dampak negatif sektor pariwisata jangka panjang seperti kenaikan harga barang lokal dan tanah, keindahan alam diganti dengan infrastruktur, memudarnya budaya dan kearifan local, kegiatan prostitusi dan penyakit seks serta narkoba. 8. Tidak adanya produk maupun jasa substitusi dari pariwisata di Indonesia 	<p>S-T (Strategi Diversifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan system jaringan pemasaran pariwisata berbasis digital/online 	<p>W-T (Strategi Bertahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kemitraan jaringan pengembangan bisnis jasa pariwisata bahari berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (penerapan system pembayaran elektronik) 2. Mengintegrasikan system keamanan dan perlindungan komunitas (<i>Coast Guard</i> dan SAR)

	<p>9. competitive advantage, industri pariwisata di Indonesia akan sulit untuk bersaing dengan industri pariwisata di negara lain</p> <p>10. daya saing pariwisata Indonesia di kawasan ASEAN berada pada peringkat ke-4 dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand</p>		
--	---	--	--

